



**MODUL**  
**PELATIHAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMBIMBING**  
**KEMASYARAKATAN PERTAMA**

**PRAKTEK PENELITIAN**  
**KEMASYARAKATAN**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM**  
**TAHUN 2019**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Drs. Rahmawan Tatan, MSi.

Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan  
Pertama

Praktek Penelitian Kemasyarakatan/ oleh Drs. Tatan Rahmawan, MSi.  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM –  
Depok, 2019.

vi, 28 hlm; 15 x 21 cm

ISBN : 978 – 602 – 0000 – 00 – 1

Diterbitkan oleh :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jalan Raya Gandul – Cinere, Depok 16512  
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

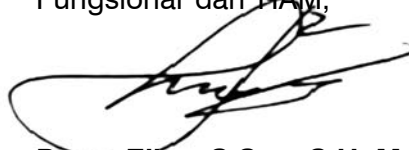
## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama telah selesai disusun. Modul ini disusun untuk bahan pembelajaran Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengikuti pelatihan tingkat dasar untuk memperoleh kompetensi dan keterampilan tentang tugas, fungsi, dan peran Pembimbing Pemasyarakatan.

Modul ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi peserta dan pengajar dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekaligus sebagai sarana penyamaan persepsi antar para Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama ini dari awal sampai akhir. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi pengguna, khususnya peserta dan pengajar Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.

Jakarta, Desember 2018  
Kepala Pusat Pengembangan Diklat  
Fungsional dan HAM,



**Pocut-Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.**

**BPSDM HUKUM DAN HAM  
FUNGSIONAL DAN HAM**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Deskripsi Singkat .....	2
C.    Manfaat Modul .....	2
D.    Hasil Belajar .....	2
E.    Indikator Hasil Belajar .....	2
F.    Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	3
G.    Waktu / Jam Pembelajaran .....	4
H.    Metode Pembelajaran .....	4
I.    Media .....	4
J.    Petunjuk Penggunaan Modul .....	5
BAB II    PERSIAPAN PRAKTEK PENELITIAN KEMASYARAKATAN.....	7
A.    Persiapan Teknis .....	7
B.    Persiapan Substantif .....	8
BAB III    PELAKSANAAN PRAKTEK PENELITIAN KEMASYARAKATAN .....	11
A.    Penerimaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan .....	11

B.	Pengumpulan Data Dan Informasi .....	13
C.	Supervisi dan Evaluasi.....	17
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN..	19
A.	Bedah Kasus.....	19
B.	Pengolahan data / informasi .....	20
C.	Penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan .....	21
D.	Ruang Lingkup dan Format Laporan Litmas....	23
E.	Dokumen Pendukung.....	24
BAB V	PENUTUP .....	25
A.	SIMPULAN.....	25
B.	UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT .....	26
DAFTAR PUSTAKA	.....	27

**BPSDM HUKUM DAN HAM  
FUNGSIONAL DAN HAM**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yang memiliki peran strategis dalam system peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam system peradilan pidana tersebut PK berperan dalam proses hokum pada tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan post adjudikasi. Peran PK tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK. Salah satu tugas dan fungsi PK tersebut adalah Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PK sangat nyata pada setiap tahapan proses hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan PK yang memiliki kompetensi yang berkualitas dalam hal penelitian kemasyarakatan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan PK yang memiliki kompetensi penelitian kemasyarakatan sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan materi-materi diklat yang mendukung kepada terciptanya kompetensi PK dalam hal penelitian kemasyarakatan.

Salah satu materi dalam diklat tersebut adalah praktek penelitian kemasyarakatan.

### **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktek penelitian kemasyarakatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan, dan laporan penelitian kemasyarakatan.

### **C. Manfaat Modul**

Modul ini sebagai sarana pembelajaran bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut sangat diperlukan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan.

### **D. Hasil Belajar**

Setelah mempelajari dan mempraktekan isi modul ini, peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) mampu melaksanakan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan jenjang jabatannya.

### **E. Indikator Hasil Belajar**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat mampu :

1. Menjelaskan tentang persiapan praktek penelitian kemasyarakatan;
2. Melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan;
3. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

#### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Salah satu indicator modul yang baik adalah kejelasan materi yang menjadi bahasan dalam modul tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang dibahas dalam modul ini dibagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Materi pokok tentang : Persiapan Praktek Penelitian Kemasyarakatan  
Bab ini membahas beberapa sub materi pokok yang meliputi Persiapan Teknis dan Persiapan Substantif
3. Bab III Materi pokok tentang : Pelaksanaan Praktek Penelitian Kemasyarakatan  
Bab ini membahas beberapa sub materi pokok yang meliputi penerimaan peserta diklat, pengumpulan data dan informasi, dan supervisi dan evaluasi.
4. Bab IV materi pokok tentang : Laporan Penelitian Kemasyarakatan  
Bab ini membahas beberapa sub materi pokok yang

meliputi bedah kasus, pengolahan data dan informasi, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, ruang lingkup dan format laporan penelitian kemasyarakatan, dan dokumen pendukung.

5. Bab V : Penutup

**G. Waktu / Jam Pembelajaran**

Mengingat metode pembelajaran modul ini adalah metode belajar mandiri, maka proses pembelajarannya tidak dibatasi oleh lamanya waktu pembelajaran di dalam kelas. Peserta Diklat dapat mempelajari modul ini kapanpun dan dimanapun dengan target pada saat praktek penelitian kemasyarakatan peserta diklat telah memahami modul ini sehingga dapat melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan dengan baik.

**H. Metode Pembelajaran**

Metode penyampaian materi yang dapat dilakukan terkait dengan isi modul ini adalah belajar mandiri / tanpa tatap muka di ruang kelas dan praktek lapangan.

**I. Media**

Media yang dibutuhkan dalam pelaksanaan materi dalam modul ini antara lain adalah Alat tulis, computer / laptop, infokus, printer, kertas HVS, Perekam suara, kamera foto,

dan UPT Pemasarakatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan.

#### **J. Petunjuk Penggunaan Modul**

Petunjuk ini merupakan hal yang dapat mendukung peserta diklat dalam upaya memahami isi modul ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perhatikan dan ikuti petunjuk penggunaan modul sebagai berikut :

1. Lakukan diskusi mandiri dengan sesama peserta diklat agar bisa lebih memahami isi modul;
2. Baca keseluruhan isi modul ini setiap bab secara bertahap dan berulang-ulang agar dapat memahami isi modul ini sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai;
3. Pelajari dan pahami pula modul tentang dasar-dasar bimbingan kemasyarakatan khususnya bab tentang penelitian kemasyarakatan dan Modul tentang metode penelitian kemasyarakatan;
4. Baca dan pahami berbagai regulasi teknis yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan, antara lain adalah:
  - a. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan;

- b. Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor PAS6.PK.01.05.02 – 572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
- c. Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor : PAS6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.

Seluruh regulasi tersebut dapat dilihat pada website dengan alamat : [www.ipkemindo.com](http://www.ipkemindo.com).

BPSDM HUKUM DAN HAM  
FUNGSIONAL DAN HAM

## **BAB II**

# **PERSIAPAN PRAKTEK PENELITIAN KEMASYARAKATAN**

***Indikator hasil belajar :***

*Setelah mempelajari modul ini peserta pendidikan dan pelatihan dapat menjelaskan tentang persiapan teknis, dan persiapan substantif*

### **A. Persiapan Teknis**

1. Waktu dan tempat praktek

Praktek penelitian kemasyarakatan dilaksanakan setelah peserta diklat mendapatkan seluruh materi yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan. Lamanya waktu pelaksanaan praktek adalah 10 (sepuluh) jam latihan, dengan ketentuan 1 (satu) jam latihan sama dengan 45 (empat puluh lima) menit. Praktek penelitian kemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang memiliki nara pidana / tahanan yang memungkinkan untuk dilaksanakannya praktek penelitian kemasyarakatan. Lapas / rutan yang ditunjuk sebagai tempat praktek diupayakan bervariasi jenisnya.

2. Pembagian kelompok dan pembimbing

Para peserta diklat dibagi ke dalam sejumlah kelompok sesuai dengan kebutuhan. Setiap

kelompok akan mendapatkan pendampingan dari pembimbing substantif yang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian kemasyarakatan.

3. Kelengkapan praktek

Demi kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan, para peserta diklat harus mempersiapkan dan membekali diri dengan berbagai kelengkapan yang menunjang kelancaran pelaksanaan praktek. Kelengkapan praktek tersebut antara lain :

- a. Alat tulis;
- b. Perekam suara;
- c. Kamera foto;
- d. Pedoman wawancara.

**B. Persiapan Substantif**

1. Karakteristik klien

Praktek penelitian kemasyarakatan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pihak yang dijadikan sebagai klien. Klien tersebut diambil dari nara pidana / tahanan yang berada di lapas / rutan yang dijadikan tempat kegiatan praktek. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan WBP / tahanan sebagai klien tersebut adalah :

- a. Bagi nara pidana, belum pernah dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk program

pembinaan awal / asimilasi / reintegrasi, sedangkan untuk tahanan adalah yang belum pernah dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk program perawatan tahanan;

- b. Jenis perkara dari para nara pidana / tahanan yang dijadikan klien diupayakan bervariasi.

## 2. File klien

Setiap nara pidana maupun tahanan akan memiliki file sebagai tempat kelengkapan administrasi mereka selama berada di lapas / rutan. Keberadaan file ini menjadi suatu hal yang penting bagi peserta diklat dalam menunjang perolehan data / informasi yang dibutuhkan dalam praktek penelitian kemasyarakatan. Data dan informasi yang terdapat di dalam file klien dapat dijadikan sumber data / informasi yang belum didapat dari sumber lainnya atau sebagai pembandingan terhadap data / informasi yang telah diperoleh (validitas data). Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum pelaksanaan praktek harus diinformasikan kepada UPT yang dijadikan tempat praktek untuk menyiapkan file WBP / tahanan yang dijadikan klien dalam praktek penelitian kemasyarakatan.

## 3. Jenis penelitian kemasyarakatan

Telah diketahui dan dipahami bersama bahwa terdapat berbagai jenis penelitian kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya. Terkait dengan

kepentingan praktek penelitian kemasyarakatan ini, jenis penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh peserta diklat terhadap nara pidana adalah disesuaikan dengan masa pidana yang telah dijalannya dengan disesuaikan dengan tahapan pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Bila nara pidana tersebut telah menjalani masa pidananya belum mencapai  $\frac{1}{3}$  dari hukumannya, maka PK melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk program pembinaan awal. Bila nara pidana tersebut telah menjalani masa pidananya telah mencapai  $\frac{1}{3}$  dan belum mencapai  $\frac{1}{2}$  dari hukumannya, maka PK melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk program asimilasi. Bila nara pidana tersebut telah menjalani masa pidananya telah mencapai  $\frac{1}{2}$  atau lebih dari hukumannya, maka PK melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk program pembebasan bersyarat. Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan jenis penelitian kemasyarakatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti jenis penelitian kemasyarakatan untuk program cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Sedangkan apa bila yang dijadikan klien dalam praktek ini berstatus tahanan, maka penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakannya adalah untuk program perawatan tahanan.

## **BAB III**

# **PELAKSANAAN PRAKTEK PENELITIAN KEMASYARAKATAN**

***Indikator hasil belajar :***

*Setelah mempelajari modul ini peserta pendidikan dan pelatihan dapat menjelaskan tentang penerimaan peserta diklat, pengumpulan data dan informasi, serta supervisi dan evaluasi.*

### **A. Penerimaan Peserta Diklat**

1. Laporan pelaksanaan kegiatan praktek penelitian kemasyarakatan  
Penerimaan peserta diklat oleh pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) masyarakat sebagai tempat pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan merupakan hal mutlak untuk dilakukan sebelum para peserta memulai kegiatan praktek. Penerimaan peserta diklat oleh pimpinan UPT tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek. Kegiatan awal dalam proses penerimaan peserta diklat di tempat pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan adalah penyampaian laporan. Laporan ini disampaikan oleh petugas pendamping dari pihak penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dan pendamping teknis yang memiliki

kompetensi dalam bidang penelitian kemasyarakatan. Pendamping dari pihak penyelenggara diklat menyampaikan laporan terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif, sedangkan pendamping teknis menyampaikan gambaran hal-hal teknis yang akan dilaksanakan oleh peserta diklat selama melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan.

2. Paparan tentang gambaran umum tempat praktek  
Pada kegiatan praktek penelitian kemasyarakatan ini, para peserta diklat dituntut untuk mengetahui dan memahami kondisi objektif UPT yang dijadikan tempat pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan. Kondisi objektif UPT tersebut meliputi berbagai hal yang dimiliki, antara lain :
  - a. Sumber daya manusia petugas;
  - b. Sarana prasarana;
  - c. Program kegiatan pembinaan
  - d. Jumlah Tahanan dan narapidana.

Gambaran umum tentang tentang tempat praktek penelitian kemasyarakatan tersebut disampaikan oleh Kepala UPT atau pejabat lainnya yang ditunjuk , dan akan dijadikan sebagai salah satu sumber data / informasi bagi peserta diklat.

## B. Pengumpulan Data dan Informasi

### 1. Pendekatan awal dengan klien

Klien adalah salah satu sumber data / informasi yang penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Data / informasi tersebut dapat diberikan oleh klien ketika klien telah memiliki kepercayaan ataupun kedekatan dengan peserta diklat. Oleh karena itu, peserta diklat sebagai pihak yang baru bertemu dan dikenal oleh klien harus mampu memberi kesan pertama yang baik kepada klien dan dipercaya oleh klien. Kesan pertama yang baik dan timbulnya kepercayaan klien terhadap peserta diklat dapat diperoleh dengan pendekatan awal yang baik dari peserta diklat kepada klien. Sebagai pendekatan awal, peserta diklat pada saat pertama kali bertemu dengan klien dapat melakukan beberapa hal seperti :

#### a. *Small talk*

Perbincangan kecil sebagai awal percakapan untuk membuka komunikasi dengan klien. *Small talk* dilakukan dalam percakapan *face to face*. Tujuan utama *small talk* adalah untuk memecahkan kebekuan/kekakuan dalam komunikasi sehingga kemudian terjadi suatu pembicaraan. *Small talk* ini harus diprakarsai oleh peserta diklat.

Contoh :

Komunikasi pada awal perjumpaan

PK : Saya merasa udara di ruangan ini terasa gerah, kalo anda mungkin sudah biasa ya....

Klien : Sama pak, saya juga merasa gerah..., mungkin karena ini musim kemarau.

b. Perkenalan

Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai pada saat melakukan perkenalan yaitu :

- 1). Klien mengenal nama kita;
- 2). Klien mengetahui asal tempat kita bertugas;
- 3). Klien mengetahui maksud dan tujuan kita menemui klien.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada saat perkenalan tersebut harus disampaikan ketiga hal tersebut secara jelas. Ketika perkenalan tersebut telah dilakukan dengan baik, diharapkan klien akan lebih mudah memberikan data / informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kemasyarakatan.

2. Sumber data / informasi

Sesuai dengan kebutuhannya, data / informasi dalam penelitian kemasyarakatan diperoleh dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu klien, petugas

pemasyarakatan yang menangani klien, aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan masalah klien, keluarga klien, dan lingkungan social klien. Pada kegiatan praktek penelitian kemasyarakatan ini, peserta diklat harus mengumpulkan data / informasi dari berbagai pihak yang dapat dijangkau dalam kegiatan praktek. Meskipun jangkauan peserta diklat terhadap sumber data / informasi dinilai terbatas, namun data / informasi yang dibutuhkan dalam laporan litmas selama praktek penelitian kemasyarakatan harus terisi secara lengkap. Oleh karena itu, data / informasi yang dibutuhkan tetapi sumber informasinya tidak dapat dijangkau oleh peserta diklat, maka kebutuhan data / informasi tersebut ditanyakan saja kepada klien. Apapun jawaban klien tentang data / informasi yang dibutuhkan tersebut dianggap benar. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta diklat memperoleh data / informasi secara lengkap sebagai bahan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Keberadaan hasil asesmen tertentu yang telah dilakukan terhadap klien sangatlah penting diketahui. Hasil asesmen merupakan salah satu informasi penting dalam penelitian kemasyarakatan sebagai salah satu bahan analisis yang harus dilakukan. Hal lain yang cukup penting untuk melengkapi data / informasi dalam penelitian kemasyarakatan adalah file klien yang dikelola oleh pihak Lapas / Rutan yang dijadikan

tempat praktek penelitian kemasyarakatan. Secara umum, seluruh petugas yang ada di UPT tempat praktek tersebut merupakan sumber data / informasi sesuai dengan kebutuhan.

3. Teknik pengumpulan data dan informasi  
Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang pada umumnya dilakukan pada saat penelitian kemasyarakatan. Penggunaan teknik-teknik pengumpulan data tersebut dilakukan sesuai dengan situasi dan kebutuhan dalam penelitian kemasyarakatan. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut adalah :
  - a. Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*)
    - 1). Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan wawancara mendalam dengan klien, yaitu :
      - a). Mulai dengan pertanyaan mudah dan penyampaian informasi fakta;
      - b). Hindari pertanyaan ganda / berulang-ulang;
      - c). Hindari pertanyaan bersifat pribadi sebelum building rapport;
      - d). Ulangi jawaban untuk klarifikasi;
      - e). Berikan kesan positif
      - f). Kontrol emosi negatif.

b. Teknik observasi

Teknik ini disebut juga dengan teknik pengamatan. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses melihat situasi saat penelitian. Tanpa harus menanyakan kepada sumber informasi, melalui pengamatan yang dilakukannya dapat memperoleh berbagai informasi tentang ruang (tempat), kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasan. Hasil pengamatan ini akan memperkaya informasi yang diperoleh dan dibutuhkan dalam litmas.

c. Teknik dokumentasi

- Dokumen sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan.
- Dokumen meliputi surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Nikah, dan lain-lain.

### C. Supervisi dan Evaluasi

Praktek penelitian kemasyarakatan adalah salah satu rangkaian kegiatan diklat yang berupa implementasi atas pemahaman peserta diklat terhadap berbagai mata diklat yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan. Pelaksanaan praktek itu sendiri harus dilakukan pendampingan substantif oleh pendamping yang memiliki

kompetensi di bidang penelitian kemasyarakatan. Pendamping substantif ini memiliki tugas untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap para peserta diklat selama melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan. Tugas supervisi yang dilakukan oleh pendamping substantif adalah sebagai pengawas, pengarah serta pengendali terhadap para peserta diklat selama melakukan praktek penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan praktek dapat berjalan dengan baik. Pada saat melakukan supervisi tersebut, pendamping substantif sekaligus melakukan evaluasi kepada para peserta diklat selama mereka melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan. Evaluasi yang dilakukan terhadap para peserta diklat selama melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan meliputi :

1. Persiapan yang dilakukan oleh peserta diklat (kesiapan alat tulis, kesiapan pedoman wawancara, kesiapan alat rekam, kesiapan kamera foto dan lain lain);
2. Keseriusan peserta diklat dalam melaksanakan praktek;
3. Kemampuan peserta diklat dalam berkomunikasi dengan klien maupun pihak lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan;
4. Kelengkapan sumber data dan informasi yang dibutuhkan.

## **BAB IV LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)**

***Indikator hasil belajar :***

*Setelah mempelajari modul ini peserta pendidikan dan pelatihan dapat menjelaskan tentang bedah kasus, pengolahan data dan informasi, penyusunan laporan, ruang lingkup dan format laporan penelitian kemasyarakatan, dan dokumen pendukung.*

### **A. Bedah Kasus**

Bedah kasus dalam pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum para peserta diklat menyusun laporan atas hasil praktek penelitian kemasyarakatan. Kegiatan bedah kasus ini merupakan upaya untuk menambah pemahaman para peserta diklat terhadap pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Melalui kegiatan bedah kasus ini diharapkan agar para peserta diklat dapat menyusun laporan penelitian kemasyarakatan dengan baik. Mekanisme pelaksanaan bedah kasus ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para peserta diklat untuk menanyakan dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan

permasalahan klien yang ditanganinya. Pelaksanaan bedah kasus tersebut difasilitasi oleh pembimbing yang memiliki kompetensi dalam penelitian kemasyarakatan.

## **B. Pengolahan Data dan Informasi**

Data dan informasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan dan informasi itulah penelitian kemasyarakatan akan dapat menunjukkan fungsinya berupa pemberian rekomendasi/pertimbangan kepada para pihak yang membutuhkannya. Data dan informasi tersebut akan memiliki arti / makna hingga dapat menentukan suatu rekomendasi setelah dilakukan pengolahan terhadap data dan informasi tersebut. Mekanisme dalam pengolahan data dan informasi tersebut adalah :

1. Melakukan tabulasi data;  
Adalah proses pemaduan atau penyatupaduan sejumlah data dan informasi yang diperoleh;
2. Melakukan rekapitulasi data;  
Merupakan langkah penjumlahan dari setiap kelompok sasaran penelitian yang memiliki karakter sama berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
3. PK melakukan reduksi data;  
Proses pengurangan data yang diartikan sebagai penyempurnaan data;

4. PK melakukan penyajian data;  
Proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan;
5. PK melakukan intepretasi data;  
Proses pemahaman makna dari serangkaian data yang tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data
6. Analisis;  
mengkaitkan hubungan antara data dan informasi yang diperoleh dengan teori dan peraturan perundangundangan agar diperoleh kejelasan tentang masalah yang dihadapi.
7. Penarikan kesimpulan  
Proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami.

### **C. Penyusunan Laporan**

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan adalah :

1. Kejelasan klien;  
Laporan penelitian kemasyarakatan harus dapat menggambarkan dan menginformasikan secara jelas tentang identitas, kondisi, dan permasalahan klien.

2. Kejelasan ruang lingkup laporan;  
Pada prinsipnya semakin singkat atau ringkas, sebuah laporan penelitian kemasyarakatan akan semakin baik, tentunya tanpa mengurangi informasi-informasi penting.
3. Kejelasan laporan;  
Laporan penelitian kemasyarakatan harus dibebaskan secara transparan, penulis tidak mengadakan temuan-temuan tanpa menjelaskan sumber datanya.

Bahasa yang digunakan harus jelas, hindari penggunaan istilah-istilah bahasa daerah, kalimat yang bersayap-sayap, kalimat yang berbunga-bunga, dan kata-kata yang bersifat subjektif.

4. Keseimbangan laporan;  
Hasil laporan penelitian kemasyarakatan harus seimbang, bukan penemuan-penemuan yang sifatnya menyenangkan pengguna laporan saja, disamping itu penulis juga harus berani menyampaikan kekurangan dan kelemahan laporannya.
5. Objektivitas laporan;  
Laporan penelitian kemasyarakatan yang objektif dimaksudkan laporan yang tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada penulis sendiri, tidak memaksakan kehendak atau opini-opini pribadi.

Laporanpun harus berisikan informasi sesuai dengan fakta dilapangan.

6. Kesimpulan yang jelas.  
Kesimpulan yang logis adalah suatu pernyataan logis yang dilakukan setelah dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian kemasyarakatan.

#### **D. Ruang lingkup dan Format Laporan Litmas**

1. Ruang lingkup  
Ruang lingkup laporan penelitian kemasyarakatan diartikan sebagai hal-hal yang harus dituangkan di dalam laporan tersebut. Ruang lingkup ini menyediakan ruang / tempat bagi data dan informasi yang dibutuhkan dan perlu disampaikan kepada para pihak yang membutuhkannya. Pada akhirnya, ruang lingkup ini menjadi suatu sistematika penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Format  
Kata “format” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran tersebut dapat menunjuk terhadap sesuatu hal apapun yang terlihat. Terkait dengan laporan penelitian kemasyarakatan, format tersebut meliputi:
  - a. Bentuk sampul laporan;
  - b. Ukuran kertas yang digunakan;

- c. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan;
- d. Ukuran margin yang digunakan;
- e. Format pengetikan;
- f. Ukuran spasi yang digunakan.

Ruang lingkup / sistematika dan format penyusunan laporan atas hasil praktek penelitian kemasyarakatan mengacu kepada standar ataupun petunjuk teknis tentang penelitian kemasyarakatan yang berlaku pada saat ini.

#### **E. Dokumen Pendukung**

Pada pelaksanaan yang sebenarnya, laporan penelitian kemasyarakatan harus dilampiri oleh dokumen pendukung sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien. Dokumen tersebut yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk pihak-pihak tertentu yang terkait, foto copy Kartu Keluarga pihak-pihak tertentu yang terkait, surat keterangan pihak terkait, surat pernyataan pihak terkait, dan lain-lain. Keterbatasan waktu yang tersedia dalam kegiatan praktek ini, menyebabkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan tersebut sangat sulit diperoleh. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dokumen pendukung dalam laporan penelitian kemasyarakatan, para peserta diklat cukup menuliskan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya pada bagian lampiran di bagian akhir laporan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Praktek penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu materi yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Melalui materi praktek ini akan lebih mendekatkan peserta diklat kepada situasi dan kondisi yang sebenarnya dalam hal penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut dapat mempercepat proses pemahaman dan kemampuan teknis PK penelitian kemasyarakatan.

Materi praktek penelitian kemasyarakatan disusun berdasarkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan agar para peserta diklat tersebut mampu memahami dan melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal-hal yang dibahas dalam modul ini meliputi persiapan praktek penelitian kemasyarakatan, pelaksanaan praktek penelitian kemasyarakatan, dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kemampuan peserta diklat dalam melaksanakan praktek penelitian kemasyarakatan ini tidak hanya ditunjang oleh pengetahuan dan pemahaman peserta diklat terhadap modul-modul yang tersedia dalam penyelenggaraan

diklat saja. Para peserta diklat pun untuk mengetahui dan memahami seluruh regulasi yang terkait dengan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Selain itu, kemampuan peserta diklat dalam memahami tentang penelitian kemasyarakatan tidak hanya ditunjang dari proses pembelajaran di dalam kelas, melainkan ditunjang pula oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui belajar mandiri maupun hasil diskusi bersama peserta diklat lainnya di luar kelas.

#### **B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

*(Silahkan diisi mengenai penilaian terhadap modul ini berikut saran yang dapat meningkatkan kualitas modul ini)*

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-111.PK.01.05.02 Tahun 2012 Tentang Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: Pas-122.Pk.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan

Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor : PAS6.PK,01.05.02-572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan

**BPSDM HUKUM DAN HAM  
FUNGSIONAL DAN HAM**